

ROAD MAP INTEGRASI REVOLUSI MENTAL DAN CAPACITY BUILDING DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ALI AKBARJONO

Abstract: *This article aims to describe how the Road Map integrassi mental revolution and Capacity Building in the national education system is applied . that in order to realize the national education system quality and competitiveness as well as looking to the demands and expectations , it is necessary each of us as children of the nation to open up horizons by mapping the concept of thinking and open the eyes of the heart (road map)*

Kata Kunci: Road Map, Revolusi Mental, Pendidikan Nasional

A. PENDAHULUAN

Laju perkembangan zaman sepertinya tidak ada yang mampu menghindari atau bahkan menghadangnya. Fenomena ini merupakan suatu manifestasi dari dampak dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi informasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6 menggambarkan, periode emas atau golden period itu harus menjadi sebuah momentum terbaik menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Namun, masih ada sejumlah tugas yang harus dilaksanakan dalam menyongsong masa-masa tersebut."Dalam menyongsong periode emas pada tahun 2020-2045 itu, kita harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus kita lakukan dalam dua dimensi sekaligus yaitu dimensi moral dan karakter kebangsaan, serta dimensi informasi dan teknologi,"¹

Setiap organisasi pendidikan, sektor privat maupun publik, harus memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) tertentu yang dapat ditonjolkan sebagai ikon unggulan, antara lain manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*) secara efektif. Khusus dalam konteks manajemen pengembangan kapasitas (*capacity building*), pemerintah selaku pemegang kebijakan perlu secara proaktif dan intens menelurkan berbagai terobosan dalam bentuk regulasi, kebijakan dan langkah-langkah inovatif lainnya dalam upaya meningkatkan berbagai potensi SDM agar mampu memberdayakannyas secara optimal

dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transformatif dan kompetitif. Pengembangan SDM bagi organisasi pada hakekatnya adalah investasi.

Sejalan dengan gelombang arus Globalisasi, standar pendidikan Nasional mulai menjadi percaturan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Banyak pro dan kontra terhadap standar pendidikan yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa problem dan tantangan pendidikan nasional dalam memasuki globalisasi harus dihadapi dengan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan perubahan di masa depan. Fenomena yang terjadi pada dunia pendidikan di era globalisasi ini adalah selalu tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan dunia bisnis².

Jika kita bandingkan dengan Negara maju di ASEAN seperti Singapura, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Mulai dari carut-marutnya sistem pendidikan, penerapan kurikulum yang masih baru, bahkan lulusan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut menjadi persoalan rumit, mengingat ketatnya persaingan yang akan terjadi.

Kondisi yang ada secara umum penjabaran permasalahan pendidikan di Indonesia dapat diakumulasikan dalam beberapa konteks, antara lain; (*pertama*) Sistem Pendidikan, Dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia, tentunya telah terjadi berbagai macam perombakan dalam kementerian di Indonesia, tak terkecuali kementerian pendidikan. Hal tersebut menjadi persoalan jika diterapkannya regulasi baru dalam Sistem Pendidikan yang telah ada dan sedang berlangsung; (*kedua*), Kurikulum Baru dimana pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2013 yang menuai berbagai macam pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra dengan diterapkannya kurikulum tersebut. Terlebih lagi dalam prosesnya masih terdapat banyak kendala, terutama perangkat-perangkat pendidikan yang belum siap keseluruhan; (*ketiga*) Lulusan tidak tepat sasaran, Sesuai data BPS Agustus 2013, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,25 persen dan angkatan kerja di Indonesia saat itu mencapai 118, 2 juta orang. Juga masih ada lebih dari 360 ribu orang sarjana yang menganggur. Sangat riskan dan memprihatinkan memang. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya juga lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan bidang akademiknya, contohnya lulusan Perbankan bekerja di sektor pertanian dan

sebagainya. Dengan seperti itu justru menghambat lulusan-lulusan lain yang memang sesuai dengan bidang akademiknya.

Menyingkapi berbagai persoalan pendidikan tersebut, rasanya pemerintah dan seharusnya seluruh elemen masyarakat di Indonesia mesti bekerja lebih keras untuk berbenah. Pendidikan hanya merupakan salah satu sektor yang masih banyak permasalahan, belum lagi sektor-sektor lainnya dengan permasalahan-permasalahannya juga yang mungkin lebih rumit. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan bersama. Karena jika tidak, bagaimana mungkin Indonesia dapat bersaing di pasar bebas ASEAN dan menjadi macan Asia seperti sedia kala?

Dari uraian fenomena di atas yang begitu kompleksnya permasalahan dari sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan dalam tulisan ini di sekitar permasalahan pokok dengan rumusan: “Bagaimana mengintegrasikan paham revolusi mental dan konsep pembangunan kapasitas (capacity building) dalam membangun sistem pendidikan nasional yang ideal?”.

B. PENGEMBANGAN KAPASITAS (BUILDING CAPACITY) BIROKRASI PENDIDIKAN

Dewasa ini upaya pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Di dalam perusahaan misalnya melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjadwalkan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Istilah umum terkesan tidak asing lagi bagi kita yang terlibat dalam aktivitas organisasi dalam bentuk apapun, yaitu, *capacity building* (pengembangan kapasitas). Istilah ini menjadi tren dan terkemuka sebagai sebuah strategi pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Konsep ini sangat cocok dengan pandangan yang kemukakan oleh Unesco, *Capacity building or development is the process by which individuals, groups, organizations, institutions and societies increase their abilities to: (a) perform core functions, solve problems, define and achieve objectives; and (b) understand and deal with their development needs in a broad context and in a sustainable manner*³. Pengertian *capacity building* menurut Unesco ini dapat dimaknai sebagai proses dari keterlibatan baik secara individu, kelompok, organisasi, lembaga maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka melalui melaksanakan tugas dan fungsi, menyelesaikan problem, menggambarkan pencapaian sasaran, memahami dan menyetujui pengembangan kebutuhan dalam konteks yang luas serta berkelanjutan.

Dengan demikian konsep *capacity building* dapat diintegrasikan dalam sistem pengembangan pendidikan melalui sistematis dan proses perubahan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. *Capacity building* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan. merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Dalam Buku *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance* yang ditulis oleh R. Riyadi Soeprapto, juga menyampaikan bahwa World Bank menekankan perhatian *capacity building* pada; (1) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis; (2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen; (3) Jaringan kerja (*network*), berupa koordinasi, aktifitas organisasi,

fungsi network, serta interaksi formal dan informal; (4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran; (5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja⁴.

M.S. Grindle dalam bukunya *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (1997) mendefinisikan Capacity building sebagai serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumberdaya manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan⁵.

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi; (1) Tenaga kerja (*dimension of human resources*), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; (2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung; (3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen⁶.

Secara operasional penerapan pengembangan kapasitas dalam sistem pendidikan terutama dalam lembaga pendidikan, menurut Henry M. Levin, mengklaim bahwa semua proses yang berkaitan dengan sistem belajar-mengajar sepatutnya tiga aktivitas yang saling terkait dalam melakukan pengembangan kapasitas di sekolah atau lembaga pendidikan, dimana masing-masing aktifitas ini memiliki tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya, yaitu: Kontrol; perencanaan dan desain; implementasi; dan evaluasi.

All works processes can be divided into four somewhat distinct activities: control, planning and design, implementation, and evaluation. Control refers to the overall governance, authority, and oversight. Planning and design refers to the organization of work, how it will be performed, who will perform it, and what equipment and other resources will be used. Implementation refers to the execution of the work plans, and evaluation refers to the assessment of the work process and outcomes⁷.

Dalam konteks ini Levin lebih lanjut menjelaskan masing-masing kapasitas dari semua pihak yang berpengaruh dalam mempertaruhkan kapasitas dan tufoksinya demi kemajuan pendidikan yang dihasilkan berkualitas. Tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pengontrolan diamanatkan pada unsur yang berada pada level manajemen paling tinggi, perencanaan dan rancangan yang bersifat teknis merupakan tanggungjawab pihak atau unsur dibawah manajemen tinggi. Implementasi (pelaksanaan) adalah tanggungjawab staf (*blue-white collar workers*) selaku pekerja yang berada pada level bawah, sedangkan evaluasi merupakan beban dan tufoksi para manajer yang berada pada level manajemen pertengahan yang melakukan supervisi proses pelaksanaan dan melakukan inspeksi hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Capacity building in the broad sense is concerned with the following; (1) Human resource development: the process of equipping individuals with the understanding, skills and access to information, knowledge and training that enables them to perform effectively; (2) Organizational development: the elaboration of management structures, processes and procedures, not only within organizations but also the management of relationships between the different organizations and sectors (public, private and community); (3) Institutional and legal framework development: making legal and regulatory changes to enable organizations, institutions and agencies at all levels, and in all sectors, to enhance their capacities⁸.

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui; (1) *Pada Tingkatan individual*; Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dll; (2) *Pada Tingkatan Organisasi*; Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi; (3) *Pada tingkatan sistem*; Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (Regulasi dan deregulasi) agar sistem

yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan di berbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya.

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui gambar berikut:



Sumber: (R. Riyadi Soeprpto, MS: 2010)

Dari gambar tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu; *pertama*, Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; *kedua*, Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi; *ketiga*, Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Sedangkan dalam konteks

pembangunan dewasa ini, tidak ada tujuan lain selain untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Suatu kondisi pemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini.

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan *good governance*, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah *pilar good governance*⁹, yaitu: (a) *Masyarakat*; Masyarakat di tingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri; (b) *Pemerintah*; Mengapa harus? ya karena untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparaturnya dan juga sistem pemerintahannya harus memiliki kapasitas yang baik pula; (c) *Swasta dan Kelompok Peduli Lain*; Upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Begitu juga dalam implikasi pembangunan kapasitas dalam konteks sistem pendidikan dapat diasimilasikan secara menyeluruh, terstruktur dan masif, yaitu antara lain dapat dikorelasikan dengan makna dari pengertian yang lebih jelas mengenai pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam undang-undang ini pendidikan didefinisikan sebagai "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara"¹⁰ (Pasal 1, ayat 1).

Pendidikan nasional didefinisikan sebagai "pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (pasal 1 ayat 2).

Dengan demikian apapun dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional" (pasal 1 ayat 3). Jadi dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat dianggap sebagai jaringan satuan-satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dengan kemajuan peradaban manusia, secara logis dunia atau sistem pendidikan harus terus dilakukan penyegaran (*refreshmen*), antara lain melalui konstruksi pemikiran menuju pemikiran yang lebih transformatif dan berwawasan global, yakni sebuah pemikiran yang mampu membaca kondisi riil masyarakat di dunia global. Konstruksi pemikiran pendidikan di Indonesia untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas sudah dimulai sejak Undang-undang nomer 1 tahun 1950 hingga produk undang-undang sekarang (UU sisdiknas No. 20 tahun 2003). Tidak hanya menciptakan manusia yang cerdas intelektual saja, tetapi juga manusia yang siap menghadapi dunia global.

Disisi lain, situasi politik nasional menurut Soedijarto, ternyata juga mempunyai andil dalam menentukan suatu kebijakan dan memengaruhi konstruksi pemikiran. Bahwa peserta didik mampu melakukan perubahan dan pendidikan dapat mengubah peserta didik, dapat mentransformasikan nilai-nilai yang akan di sampaikan¹¹.

Perkembangan zaman berwujud pada globalisasi. Kondisi ini merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Selain itu, para cendekiawan Barat mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat bahwa dunia ditandai oleh kemajemukan (*pluralitas*) budaya maka globalisasi sebagai proses juga ditandai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses saling memengaruhi antarbudaya.

Mensikapi pengaruh globalisasi, peran peserta didik melaksanakan transformasi untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan dan anti diskriminasi, tujuan pendidikan kedepan perlu diorientasikan pada beberapa hal, diantaranya; (1) Membentuk kesadaran dan sikap kritis setriap peserta didik dalam merespon tuntunan pengembangan sehingga ia mampu menghadapi persaingan; (2) Melaksanakan transformasi nilai-nilai kemanusiaan; (3) Melakukan upaya gerakan sosial baru (*new social moverment*) untuk perubahan sosial; (4) Mampu menjadikan basis pertahanan karakter bangsa dan kebudayaan Nasional, di tengah kompleksitas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam; (5) Membentuk manusia yang cakap, kreatif, dan mandiri yang siap menghadapi tantangan perkembangan zaman seperti visi dan misi Pendidikan Nasional; (6) Menciptakan kondisi masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan¹².

Melihat kemelut dunia pendidikan di indonesia saat ini, tentu dalam usahanya mengawali perbaikan pun akan mengalami kesulitan yakni terkait dengan dari mana kita akan memulainya terlebih dahulu. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang demokratis dan pluralis ini diperlukan kesadaran dan partisipasi semua pihak dari berbagai kalangan yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional untuk berperan aktif dengan tetap konsisten serta berkomitmen melakukan pengembangan (*transformative*) pendidikan yang berkualitas dan bernilai daya saing (*competitiveness*), antara lain melalui penerapan prinsip pembangunan kapasitas (*capacity building*) secara optimal yang barengi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

C. REVOLUSI MENTAL PENDIDIKAN INTEGRATIF

Gagasan revolusi mental yang diluncurkan presiden Joko Widodo mendapat respons positif dari berbagai kalangan, baik dari teknokrat, agamawan, maupun para pendidik. Ide revolusi mental bermula dari kegalauan yang dirasakan masyarakat di berbagai ruang kehidupan. Antara lain, di jalan-jalan kota besar dan kecil serta di ruang publik yang lain, termasuk media masa dan media sosial. Revolusi mental harus segera dilakukan. Mengingat, *pertama*, gagalnya rezim Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan, yang belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (*nation building*).

Kedua, tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung hingga sekarang, mulai korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan hingga sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunistis. Semua itu masih berlangsung dan beberapa di antaranya bahkan makin merajalela di alam Indonesia yang terkenal ramah ini.

Meski sangat sederhana, konsep yang ditawarkan Joko Widodo itu didasari oleh pemikiran yang sangat fundamental, filosofis, dan empiris sehingga mampu menyentuh akar persoalan. Masalahnya, revolusi mental dimulai dari mana?

Pendidikan, menurut Sulistiyo, ketua umum DPP PGRI, harus dipandang sebagai sebuah proses kebudayaan yang mengeluarkan dan mengembangkan daya pikir, daya karsa, daya karya, dan daya raga yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat pertumbuhan peserta didik. Oleh karena itu perlu diwujudkan sebuah gerakan nasional "*Revolusi Mental*" sebagai reformasi mendasar dalam melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional¹³.

Gerakan tersebut, terang Sulistiyo, dilakukan dalam empat komponen sekaligus mulai dari revolusi manajemen makro pendidikan nasional, revolusi manajemen pendidikan daerah, revolusi manajemen satuan pendidikan, dan revolusi pembelajaran. Ini semua harus dilakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Revolusi manajemen makro pendidikan nasional, dilakukan dengan penerapan prinsip meritokrasi. Pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada perwujudan keseimbangan antara upaya penguatan identitas dan kepribadian bangsa, sekaligus peningkatan kualitas dan daya saing Indonesia di era global.

Sebagai bentuk implikasi penerapan revolusi mental pada skala manajemen makro, yaitu, antara lain; Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah¹⁴.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina M Abduhzen menyebut, saat ini Indonesia telah memiliki berbagai hal normatif dalam pendidikan seperti perangkat undang-undang terkait sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Kemudian, Jokowi juga memiliki paradigma tersendiri seperti revolusi mental, trisakti hingga

fokus kemaritiman. Tugas utama dua menteri pendidikan dalam Kabinet Kerja Jokowi adalah membuat cetak biru (blue print) baru sistem pendidikan nasional." *Blue print* baru pendidikan ini harus bisa mengelaborasi hal-hal normatif yang sudah ada tadi dan juga mampu mengakomodasi gagasan pemerintah baru secara padu dan koheren. Ia juga harus berkorelasi dengan sisdiknas¹⁵.

Lebih lanjut Abduhzen memaparkan, salah satu poin yang dapat masuk dalam blue print pendidikan itu adalah penyetopan implementasi kurikulum 2013. Alasannya, kurikulum anyar ini tidak kompatibel dengan gagasan revolusi mental dan Trisakti yang diusung pemerintahan Jokowi. Sebagai pengganti kurikulum 2013, pemerintahan Jokowi bisa menerapkan kebijakan jalan pintas (shortcut) yang lebih sederhana. Anggaran dana untuk implementasi kurikulum 2013 ini pun bisa dialihkan ke kebijakan tersebut. Begitu juga pada misi menghapuskan ujian nasional harus diwujudkan dan dicari model evaluasi penggantinya dalam blue print tersebut.

Revolusi manajemen pendidikan daerah, dilakukan dengan perbaikan mendasar dan menyeluruh melalui peningkatan efektivitas manajemen pendidikan nasional di daerah. Sebagian urusan pusat di bidang pendidikan telah didelegasikan termasuk pendanaannya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) namun hingga sekarang akuntabilitas manajemen pendidikan di daerah masih meragukan.

Revolusi manajemen sekolah, terang Sulistiyo, dilakukan dengan peningkatan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan karena manajemen sekolah yang tak sempurna sehingga belum terjadi kekuatan kolektif bagi peningkatan mutu. Sedangkan revolusi pembelajaran, dilaksanakan dengan penguatan mutu dan keunggulan pendidikan. Ini harus jadi prioritas tertinggi kebijakan pendidikan nasional yang didukung anggaran terbesar mulai dari usia dini (Paud) hingga pendidikan tinggi.

Dalam konteks sistem pendidikan secara umum, istilah revolusi mental mengandung makna yang integratif dan komprehensif di dalam hal-hal proses mengembangkan mutu manajemen sistem pendidikan. Secara gamblang Karlina Supeli¹⁶ menguraikan bahwa tampaknya memang tidak ada yang baru yang berkenaan dengan revolusi mental. Dengan memusatkan perhatian pada perubahan kebiasaan sehari-hari yang punya dampak kebaikan publik, kebaruan terletak pada cara mendidik. Dalam konteks ini Soedijarto menekankan bahwa pendidikan dipandang

bermutu, diukur dari perannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian¹⁷.

Proses pendidikan mesti bermuara ke corak kebiasaan bertindak. Artinya, pendidikan diarahkan ke transformasi dari pengetahuan diskursif (*discursive knowledge*) ke pengetahuan praktis (*practical knowledge*). Pengetahuan diskursif tentu sangat dibutuhkan dalam mengawal secara kritis kehidupan berbangsa-bernegara, namun biarlah sementara ini itu jadi urusan para intelektual/cendekia. Bagi agenda 'Revolusi Mental', yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan praktis – transformasi pada tataran kebiasaan bertindak sehari-hari para warga negara dalam lingkup dan skala seluas bangsa.

Revolusi mental dimulai dari pendidikan, mengingat peran pendidikan sangat strategis dalam membentuk mental anak bangsa. Pengembangan kebudayaan maupun karakter bangsa diwujudkan melalui ranah pendidikan. Pendidikan pengembangan karakter adalah sebuah proses berkelanjutan dan tidak pernah berakhir (*never ending process*). Selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis, pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Implementasi pendidikan karakter tidak harus dikaitkan dengan anggaran. Dibutuhkan komitmen dan integritas para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk secara sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai kehidupan di setiap pembelajaran.

Pendidikan karakter tidak sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik. Dengan begitu, peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik (*loving the good/moral feeling*), dan perilaku yang baik (*moral action*), dan biasa melakukan (*psikomotor*). Jadi, pendidikan karakter erat berkaitan dengan habit (*kebiasaan*) yang dipraktikkan dan dilakukan.

Dari jabaran tentang konsep dan paradigma revolusi mental dalam sistem pendidikan nasional menuju pencapaian pendidikan yang berkualitas, transformatif serta kompetitif, selaku anak bangsa yang berperan sebagai yudikatif, eksekutif dan semua lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Mauroke seyogyanya berpikiran positif dan komit untuk menerapkan revolusi mental seutuhnya dalam

upaya membangun pendidikan yang diharapkan, antara lain dengan merujuk seperti pola yang diterapkan di negara-negara yang sudah maju sistem pendidikan, seperti Firlandia, Korea, Singapore, dll, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai memiliki nilai inovatif dan transformatif¹⁸, antara lain;

1. Seleksi guru yang ketat di negara Finlandia guru adalah profesi terhormat dan membanggakan. Guru adalah profesi yang diidamkan oleh para pemuda. Seleksi untuk mengajar di suatu sekolah sangat ketat. Calon guru dengan ijazah S-1 hanya 5% yang diterima dan calon guru dengan ijazah S-2 20% diterima. Dengan seleksi guru yang ketat, terjadilah guru-guru berkualitas. Dengan guru yang berkualitas maka akan tercipta pulalah pendidikan yang berkualitas;
2. Gaji tinggi, gaji guru di Finlandia adalah 40 juta perbulan. Hal tersebut mengantarkan gaji guru tertinggi ke-5 di dunia. Sebelum menjadi guru tentunya mereka harus masuk pada fakultas keguruan terlebih dahulu. Di Finlandia untuk masuk ke fakultas keguruan lebih sulit dibandingkan dengan masuk ke fakultas kedokteran;
3. Pendidikan Anak Usia Dini, Otoritas pendidikan di Finlandia mempercayai 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita, sehingga masa ini menjadi strategis untuk mengoptimalkan kerja otak. Finlandia terus mempersiapkan pendidikan anak untuk lebih baik. Pendidikan Anak Usia Dini adalah titik berat pendidikan di Finlandia. Mulai ajak Anak Anda ke PAUD;
4. Kurikulum yang Konsisten, Kurikulum di negara pendidikan terbaik di dunia ini telah sejak lama mempersiapkan kurikulum mereka. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Mereka terkesan tak mau coba-coba terhadap kurikulum yang baru. Dengan demikian tak akan terjadi kebingungan antara guru dan murid, dan fokus pada tujuan pendidikan tercapai. Bagaimana dengan kurikulum pendidikan di Indonesia ? Semoga menjadi lebih baik;
5. Meminimalisir ujian, Pemerintah Finlandia percaya bila ujian banyak itu hanya akan memfokuskan siswa pada nilai sekedar lulus. Pendidikan Finlandia membimbing siswa untuk lebih mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan mencari informasi secara independen. Model pembelajaran di Finlandia mendorong siswa untuk lebih cerdas dan mandiri;

6. Tak Ada Ranking, Tak ada ranking membuat mental siswa Finlandia kuat. Seolah-olah tak ada diskriminasi, dan di Finlandia tak ada kelas unggulan. Penilaian didasarkan pada bagaimana mereka mengerjakan tugas, dan bukan pada benar atau salahnya jawaban. Penilaian didasarkan pada usaha mereka mengerjakan tugas. Program remedial adalah waktu siswa memperbaiki kesalahannya. Para siswa berusaha untuk membawa sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan;
7. Biaya Pendidikan ditanggung Negara, Biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh negara. Dengan penduduk hanya 5 juta jiwa pemerintah mampu menanggung biaya pendidikan sebesar 200 ribu euro. Biaya tersebut per siswa hingga menuju perguruan tinggi. Jadi keluarga miskin dan kaya mampu merasakan kesempatan belajar yang sama.

D. REKLAMASI SISTEM MUTU PENDIDIKAN SECARA TERSTRUKTUR DAN MASIF.

Secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Sedangkan pengertiannya secara ilmiah dalam ranah ilmu teknik pantai, reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau¹⁹.

Dalam konteks pendidikan makna reklamasi secara konotatif bisa diinterpretasikan dengan logis sebagai upaya perbaikan secara serius, masif dan terstruktur tentang mekanisme dan sistem perwujudan pendidikan yang transformatif, bermutu, dan bernilai daya saing (*competitiveness*).

Dari penafsiran ini reklamasi mutu pendidikan dapat diklaim memiliki hubungan yang signifikan dengan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain yang harus berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan khusus yang

telah ditetapkan sebelumnya". Suatu sistem memiliki tiga unsur pokok: (1) tujuan, (2) isi atau komponen, dan (3) proses. Kalau pendidikan nasional kita benar-benar merupakan suatu sistem, maka ia setidaknya-tidaknya memiliki tiga unsur pokok tersebut. Di samping itu, komponen-komponen sistem tersebut harus berhubungan dan berinteraksi secara terpadu. Adapun komponen pokok dalam sistem pendidikan yaitu : tujuan dan prioritas, anak didik (siswa), pengelolaan, struktur dan jadwal, isi kurikulum, pendidik (guru alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian dan biaya.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, haruslah ada yang menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga proses ini dilaksanakan untuk menentukan layak tidaknya lembaga pendidikan yang berstandar nasional.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk pemerataan standar mutu pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perubahan lokal, nasional dan, global. Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara ASEAN yang lain, maka peningkatan-peningkatan di segi pendidikan akan terus terjadi. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Kekhawatiran menonjol yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu antara lain menyangkut lemahnya perbaikan mutu guru dan materi didik, serta metode pembelajaran (yang masih tradisional, khususnya untuk tujuan demokratisasi), dan lemahnya sistem evaluasi dan orientasi efisiensi eksternal, khususnya relevansinya dengan kebutuhan demokratisasi masyarakat dan pengembangan dunia usaha.

Berdasarkan analisis dan fenomena yang ada, sikap kongkrit yang perlu segera diambil dalam perspektif reklamasi mutu pendidikan nasional, adalah; *pertama*,

Reformasi Pendidikan dengan mengupgrade 2,7 juta guru dan 0,3 juta dosen. Reformasi pendidikan ini dimulai pada saat Presiden SBY mendeklarasikan guru sebagai profesi pada th. 2004. Setelah itu diikuti dengan pembentukan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), dan disahkannya UU Guru dan Dosen pd akhir 2005.

Kedua, Standardisasi Pendidikan. Melalui PP Nomor 19 tahun 2005 telah dikeluarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan 8 standar yaitu: standar isi, kompetensi, proses, penilaian, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, biaya, serta sarana dan prasarana. Ujian Nasional adalah untuk mengukur pencapaian standar kompetensi. Tahun 2008 akan dimulai UN untuk sekolah dasar. Kemudian akan dilaksanakan akreditasi program dan satuan pendidikan untuk mengukur keberhasilan penjaminan mutu pendidikan.

Ketiga, Pendanaan biaya operasional sekolah, yaitu dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOS Buku, dan BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu). BOMM diperuntukkan bagi pendidikan menengah. Semua SMK mendapatkan BOMM, untuk SMA hanya sebagian.

Ketiga, Subsidi kepada peserta didik, diberikan untuk siswa miskin tingkat SMA dan SMK. Subsidi lain adalah biasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin.

Kelima, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Selain rehabilitasi dan pembangunan sekolah baru, dilakukan juga pengadaan buku teks untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs./SMPLB; dan dibangun juga instalasi jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan, dan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat kabupaten dan kecamatan.

Keenam, Peningkatan mutu proses pembelajaran. Program ini dimulai dengan fleksibilitas pengembangan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan. Misalnya penerapan kurikulum 13 perlu ditinjau ulang karena belum melalui proses evaluasi dan analisis kebutuhan.

Ketujuh, Penguatan tata kelola. Program ini dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparat di bidang akuntansi dan

keuangan, dan aplikasi sistem dan prosedur akuntansi/keuangan sesuai Standar Akuntansi Instansi.

Kedelapan, Pemerataan pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota namun didaerah terpencil juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk pemerataan pendidikan di semua wilayah.gat penting untuk mematangkan ilmu yang didapat sebelumnya.

Dengan membandingkan kendala (kekhawatiran) terhadap upaya pemerataan dengan kendala (kekhawatiran) terhadap upaya peningkatan mutu di atas menjadi jelas bahwa penanganan trade-off antara keduanya adalah masalah yang krusial. Kendati dalam design pemerintah keduanya diharapkan akan berjalan seiring (merata dan meningkat mutunya), namun secara umum terdapat prognosa bahwa mengingat kemampuan pendanaan untuk pemerataan-peningkatan mutu dan manajemen oleh pemerintah yang masih lemah, maka realitas politik Daerah dan persaingan antar (otonomi) sekolah/madrasah memperebutkan akses politik dan daya masyarakatnya itulah yang akan lebih menentukan pemerataan peningkatan mutu pendidikan kita. Menurut Murip Yahya (2009:80) bahwa pada dasarnya otonomi daerah memberikan peluang kepada pengelola pendidikan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Seperti; (a) Merumuskan tujuan institusi yang mengacu pada tujuan nasional; (b) Merumuskan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat suatu daerah; (c) Menciptakan situasi belajar dan mengajar yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan; (d) Mengembangkan sistem evaluasi yang tepat dan akurat, baik dari prestasi siswa maupun penyelenggaraan²¹.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan raian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan berdaya saing serta ideal dengan tuntutan dan harapan, maka sangat perlu setiap kita sebagai anak bangsa untuk membuka cakrawala melalui pemetaan konsep berfikir dan membuka mata hati (*road map*), yaitu:

1. Melihat kemelut dunia pendidikan di indonesia saat ini, tentu dalam usahanya mengawali perbaikan mengalami kesulitan yakni terkait dengan dari mana kita akan memulainya terlebih dahulu. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang demokratis

dan pluralis ini diperlukan kesadaran dan partisipasi semua pihak dari berbagai kalangan yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional untuk berperan aktif dengan tetap konsisten serta berkomitmen melakukan pengembangan (*transformative*) pendidikan yang berkualitas dan bernilai daya saing (*competitiveness*), antara lain melalui penerapan prinsip pembangunan kapasitas (*capacity building*) masing-masing potensi sesuai dengan kapasitas atau kompetensinya secara optimal, dibarengi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

2. Konsep *capacity building* dapat diintegrasikan dalam sistem pengembangan pendidikan melalui sistematisasi dan proses perubahan untuk meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. *Capacity building* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan.
3. "*Revolusi Mental*" sebuah gerakan nasional sebagai reformasi mendasar dalam melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional. Gerakan ini dilakukan dalam empat komponen sekaligus mulai dari revolusi manajemen makro pendidikan nasional, revolusi manajemen pendidikan daerah, revolusi manajemen satuan pendidikan, dan revolusi pembelajaran. Ini semua harus dilakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
4. Dalam konteks pendidikan makna reklamasi secara konotatif bisa diinterpretasikan dengan logis sebagai upaya perbaikan secara serius, masif dan terstruktur tentang mekanisme dan sistem perwujudan pendidikan yang transformatif, bermutu, dan bernilai daya saing (*competitiveness*). Dari penafsiran ini reklamasi mutu pendidikan dapat diklaim memiliki hubungan yang signifikan dengan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi satu sama lain yang harus berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya". Suatu sistem memiliki tiga unsur pokok: (1) tujuan, (2) isi atau komponen, dan (3) proses.

Penulis: Ali Akbar Jono, M.Pd adalah Kandidat Doktor Prodi Manajemen Pendidikan UNJ, Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

African Capacity Building Foundation (ACBF), 2001, Capacity Needs Assessment: A Conceptual Framework, in ACBF Newsletter Vol. 2, p. 9-12.

Buletin, BSNP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Dewantara, Ki Hadjar, 1945 [1963]. *Karja Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Taman Siswa.

Grindle, M.S. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (1997)

<http://news.okezone.com/read/2014/10/27/65/1057407/pendidikan-nasional-perlu-dirombak-total>

<http://www.siperubahan.com/read/1473/Sistem-Pendidikan-Indonesia-VS-istem-Pendidikan-Finlandia>

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100426210347AAVNYYA8>.
Arti reklamasi

Joko Widodo (Presiden RI-7) *tribun news: Pendidikan Perlu Revolusi Mental*<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/10/jokowi-pondidikan-perlu-revolusi-mental>

Levin, Henry M. 1991. *Building School Capacity for effective teacher Empowerment*. CPRE (Consortium For Policy Research in Education: USA

Murip Yahya, *Pengantar Pendidikan, Prospect*, Bandung, 2009.

Opcit. Soedijarto.2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Buku Kompas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan nasional

Putra, Firza Imam. artikel di Kompas edisi kamis 17 desember 2009

- Rembangy, Musthofa. 2010. Pendidikan Transformatif: pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi. Yogyakarta: Teras.
- Rembangy, Musthofa. 2010. Pendidikan Transformatif: pergulatan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi. Yogyakarta: Teras.
- Soedijarto.2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: Buku Kompas.
- Soeprapto, R. Riyadi MS, 2010, The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word bank.
- Sukarno, M., 2005: Refleksi Atas Beberapa Isu Kebijakan Pendidikan. Paper disampaikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2005 dengan tema "Satu Tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono" diselenggarakan oleh Kedepatian IPSK-LIPI, Jakarta: Widya Graha Lt I, 13 Desember 2005
- Sulistiyo: Ketua PGRI. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/20/ndpit0-revolusi-mental-harus-dijadikan-reformasi-dasar-perbaiki-sistem-pendidikan>
- Surat Kabar, Kompas. Jakarta.
- Surat Kabar, Sriwijaya Post. Jakarta.
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden RI ke-6 dalam Musyawarah Besar III Kosgoro 1957 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, diunduh dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/sby-indonesia-alami-periode-emas-2020-2030.html>.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000. Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium III: Refleksi dan reformasi. Yogyakarta: Adicita.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Fokus Media, Bandung, 2006.
- UNDP (United Nations Development Programme) atau program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.
- UNESCO. 2006. Capacity Building. International Institute for Educational Planning (IIEP): Paris.
- Yahya Murip. 2009. Pengantar Pendidikan, Prospect, Bandung, 2009.

¹Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden RI ke-6 dalam Musyawarah Besar III Kosgoro 1957 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, diunduh dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/sby-indonesia-alami-periode-emas-2020-2030.html>.

²Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000. Pendidikan di Indonesia memasuki Milenium III: Refleksi dan reformasi. Yogyakarta: Adicita.

³UNESCO. 2006. Capacity Building. International Institute for Educational Planning (IIEP): Paris. UNESCO adalah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis.

⁴Soeprapto, R. Riyadi. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance

⁵Grindle, M.S. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries (1997)

⁶UNDP (United Nations Development Programme) atau program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang.

⁷Levin, Henry M. 1991. Building School Capacity for effective teacher Empowerment. CPRE (Consortium For Policy Research in Education: USA

⁸Opcit. Unesco. 2006. Capacity Building. International Institute for Educational Planning (IIEP): Paris

⁹Soeprapto, R. Riyadi. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance

¹⁰Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

¹¹Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: Buku Kompas.

¹²Ibid. Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: Buku Kompas

¹³Sulistiyo: Ketua PGRI. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/20/ndpit0-revolusi-mental-harus-dijadikan-reformasi-dasar-perbaikan-sistem-pendidikan>

¹⁴<http://news.okezone.com/read/2014/10/27/65/1057407/pendidikan-nasional-perlu-dirombak-total>

¹⁵Ibid.

¹⁶Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

¹⁷Opcit. Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: Buku Kompas

¹⁸<http://www.siperubahan.com/read/1473/Sistem-Pendidikan-Indonesia-VS-Sistem-Pendidikan-Finlandia>

¹⁹<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100426210347AAVNVA8>. Arti reklamasi

²⁰Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

²¹Yahya Murip. 2009. Pengantar Pendidikan, Prospect, Bandung, 2009.